

PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK OLEH PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DALAM UPAYA Mendukung PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN BERPOLITIK MASYARAKAT DI KABUPATEN PANGANDARAN

Yan Yan Yuliana¹, Adityawarman², Agus NurulSyam S³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia

E-mail: Yanyanstudio@gmail.com

ABSTRAK

Pendidikan Kader Pratama yang dilaksanakan di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pangandaran dimaksudkan untuk membangun kesadaran ideologi, kesadaran berorganisasi, kepedulian pada lingkungan sekitar hingga kesadaran berpolitik yang lebih besar untuk mewujudkan cita-cita bersama. Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kabupaten Pangandaran sebagai bentuk upaya mendukung Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesadaran berpolitik masyarakat di Kabupaten Pangandaran menjadi masalah utama dalam penelitian ini. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan pendidikan politik oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam upaya mendukung Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesadaran berpolitik masyarakat di Kabupaten Pangandaran. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah melalui metode pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat bahwa pelaksanaan pendidikan politik oleh DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Pangandaran dalam upaya mendukung pemerintah daerah untuk meningkatkan kesadaran berpolitik masyarakat di Kabupaten Pangandaran belum berjalan secara optimal, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan hasil penelitian ditemukan permasalahan yaitu Sumber Daya Manusia yang kurang kompeten, adanya keterbatasan anggaran untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan, masih kurangnya pemahaman kader tentang nilai-nilai etis dan estetis, kurangnya pemahaman tentang kesadaran hak dan kewajiban sebagai warga negara yang dilakukan oleh pemerintah, sebagai mitra DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pangandaran karena terkendala dampak Covid 19.

Kata Kunci: *Pelaksanaan, Pendidikan Politik, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Kesadaran Berpolitik*

PENDAHULUAN

Partai Politik merupakan suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai nilai dan cita cita yang

sama. Partai Politik mempunyai fungsi komunikasi, sosialisasi dan rekrutmen politik. Dalam proses rekrutmen, partai politik harus mengajak secara aktif dan turut aktif dalam kegiatan politik.

Pendidikan Politik merupakan aktifitas memepengaruhi, mengubah dan membentuk sikap dan perilaku berdasarkan nilai-nilai yang dianggap telah benar dan telah member manfaat bagi kehidupan manusia. Pendidikan politik merupakan proses penguasaan simbol-simbol pribadi. Kontribusi pendidikan politik yang diselenggarakan oleh partai politik cukup memberikan makna apabila orientasi kepentingan memicu dalam kepentingan nasional.

Partai politik di Indonesia sebagai pilar demokrasi memang sudah seharusnya dirapihkan dan disempurnakan untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis, transparan dan akuntabel, serta mempunyai manfaat bagi masyarakat dan bangsa. Sebuah partai politik yang dibentuk tentu bertujuan untuk membentuk budaya politik yang tertib, santun dan bermartabat karena partai politik merupakan pintu utama bagi pengembangan sistem pengkaderan yang memadai untuk menghasilkan pemimpin yang mempunyai kehormatan, keadaban dan kemampuan yang baik untuk memimpin rakyat.

Terkait dengan fungsi partai politik dalam melaksanakan pendidikan partai politik yang diatur pada pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, pendidikan politik berperan dalam meningkatkan persatuan nasional, mewujudkan keadilan, dan menegakkan hukum. Apa urgensi dari pelaksanaan

pendidikan politik oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Pangandaran.

Beberapa fungsi partai politik di Indonesia menurut pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik antara lain :

1. Melaksanakan pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Negara;
3. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Pendidikan politik yang diselenggarakan lembaga seperti Partai Politik, KPUD dan Bakesbangpol dalam UU No. 1 Tahun 2018 tentang tata cara perhitungan, penganggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dan tertib administrasi pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggung jawaban keuangan partai politik. Dalam hal ini tugas dan fungsi untuk mendidik dan memberikan materi pada generasi muda untuk penanaman pengetahuan sejak dini. Maksud peraturan hal ini supaya masyarakat mengetahui system dalam pesta demokrasi

Pendidikan politik dikalangan Pemula sangat rendah dan harus diperhatikan. Pendidikan politik diatur dalam UU No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik. Pasal 31 tentang fungsi partai politik untuk memberikan pendidikan politik. Partai politik memiliki peran meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan juga membangun kesatuan bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan Negara.

Pendidikan Politik bagi seorang kader partai sangatlah penting untuk dilakukan. Pemahaman tentang Politik dan Ideologi Partai merupakan dua hal utama yang wajib dipahami oleh setiap kader partai.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) melakukan kaderisasi sebagai sarana rekrutmen, untuk keberlanjutan perjuangan regenerasi yang tentu akan berpengaruh juga terhadap regenerasi kepemimpinan dalam satu negara. Karena kegagalan partai politik dalam melakukan kaderisasi akan membuat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik itu sendiri menjadi menurun dan sebagai indikasinya adalah tingginya angka golongan putih (golput) pada saat pemilihan umum.

Pentingnya Kaderisasi di partai politik tidak hanya menyangkut regenerasi kepemimpinan melainkan

juga tentang pendidikan ideologi kepada kader partai agar mampu mengoprasionalisasikan ideologi partai secara nyata baik di eksekutif, legislatif, maupun di struktural partai.

Kader suatu organisasi merupakan orang yang sudah terlatih dan dipersiapkan dengan berbagai keterampilan dan disiplin ilmu, sehingga dia memiliki kemampuan yang diatas rata-rata orang umum.

PDI Perjuangan tidak luput dari tugasnya yakni melaksanakan pendidikan politik melalui pendidikan kaderisasi yang berjenjang, mulai dari Pendidikan Kader Pratama ditingkat DPC (Dewan Pimpinan Cabang), Pendidikan Kader Madya ditingkat DPD (Dewan Pimpinan Daerah) dan Pendidikan Kader Utama di tingkat Nasional.

DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pangandaran meyakini bahwa pentingnya membenahi kualitas partai di daerah daerah adalah dengan memperbaiki para kadernya supaya dapat melaksanakan tugas pokoknya menyiapkan calon-calon pemimpin daerah maupun nasional yang berkualitas dan memegang teguh tanggung jawabnya. Hal ini menjadi satu hal yang menarik bagi peneliti untuk melakukan pendalaman pendidikan kader berjenjang dalam jenjang Pendidikan Kader Pratama di tingkat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pangandaran.

Pendidikan Kader Pratama yang dilaksanakan di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pangandaran dimaksudkan

untuk membangun kesadaran ideologi, kesadaran berorganisasi, kepedulian pada lingkungan sekitar hingga kesadaran berpolitik yang lebih besar untuk mewujudkan cita-cita bersama. Dan pastinya diharapkan setiap kader partai bisa melakukan ideologis perjuangan untuk membentengi diri dari praktik pragmatisme politik dan bidang kehidupan lainnya.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian pelaksanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya.

Fungsi dari Pelaksanaan menurut Rimendra (2013) adalah :

1. Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam persiapan tujuan.
2. Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan
3. Menjelaskan kebijakan yang diterapkan
4. Proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat bertanggung jawab dengan penuh kesadaran dan produktifitas yang tinggi.

Pengertian Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan,

khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik.

Di samping itu politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain:

- a. Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles);
- b. Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan Negara;
- c. Politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat;
- d. Politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.

Menurut Andriansyah (2016) menyatakan bahwa pendidikan politik dalam dipahami sebagai perbuatan memberi latihan, ajaran, serta bimbingan untuk mengembangkan kapasitas dan potensi diri manusia, melalui proses dialogik yang dilakukan dengan suka rela antara pemberi dan penerima pesan secara rutin, sehingga para penerima pesan dapat memiliki kesadaran berdemokrasi dalam kehidupan bernegara.

Definisi pendidikan politik menurut R. Hayer dalam Kartono, (2009) menjelaskan bahwa pendidikan politik adalah usaha membentuk manusia menjadi partisipan yang bertanggungjawab dalam politik.

Sejalan dengan teori para ahli lainnya yaitu menurut Labolo (2017:21) menyatakan bahwa pendidikan politik dapat disampaikan melalui metode dan materi penyampaian penyampaian sebagai berikut :

1. Materi Pendidikan

Materi yang disampaikan dalam proses pendidikan politik kepada kader dan pengurus partai lebih berorientasi kepada pemantapan dan pengembangan program partai, peningkatan loyalitas dan dedikasi kader, peningkatan kualitas, kemampuan kader untuk dapat berfikir futuristic. Sedangkan materi yang disampaikan dalam proses pendidikan politik kepada masyarakat meliputi posisi, hak, kewajiban dan tanggungjawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan konstitusi negara.

2. Metode Pendidikan

Berdasarkan penjabaran materi pendidikan diatas, diketahui bahwa materi pendidikan politik yang disampaikan kepada kader dan pengurus partai manapun masyarakat yang berbeda. Hal ini disebabkan metode yang digunakan untuk menyampaikan materi tersebut juga berbeda. Metode yang digunakan untuk menyampaikan materi kepada kader dan pengurus partai adalah penyampaian yang intensif secara langsung untuk membentuk mindset mereka agar memiliki loyalitas dan integritas kepada partainya. Metode yang digunakan untuk menyampaikan materi kepada masyarakat dapat berupa penyampaian secara langsung maupun tidak langsung.

Namun pada praktiknya, penyampaian materi lebih sering dilakukan secara tidak langsung misalnya dengan menggunakan media massa sebagai perantara.

3. Tujuan pendidikan

Tujuan partai politik memberikan pendidikan politik bagi kader dan pengurus partai adalah untuk meningkatkan solidaritas politik dalam menjaga dan memelihara integritas bangsa, memberikan pengetahuan tentang tugas, fungsi, hak dan kewajiban partai politik, serta untuk meningkatkan kapasitas kader dan pengurus partai.

Tujuan partai politik memberikan pendidikan politik bagi masyarakat adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diharapkan dengan diselenggarakannya pendidikan politik tersebut akan mendorong partisipasi politik dari kader dan pengurus partai serta masyarakat

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) adalah sebuah partai politik di Indonesia. Sejarah PDIP dapat ditelusuri kembali ke Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan oleh Ir. Sukarno pada tanggal 4 Juli 1927. PNI telah bergabung dengan Partai Permusyawaratan Rakyat (Partai Murba), Ikatan Pendukung Independen Indonesia (IPKI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katolik. Partai hasil merger tersebut kemudian

diberi nama Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada 10 Januari 1973.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Hal ini dilakukan sejalan dengan pendapat Moleong, (2014:2) yang bertujuan “Untuk mendeskripsikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan baik dari hasil wawancara maupun observasi”. Lamanya penelitian selama 9 bulan. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan (observasi, wawancara dan dokumentasi). Jumlah informan sebanyak 10 orang. Teknik analisa data dengan dengan cara deskriptif, yaitu mengumpulkan data, mengolah data, menganalisa serta menginterpretasikannya data kualitatif dengan melakukan triangulasi terhadap sumber data.

METODE

Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. Sugiyono (2009:13) mengemukakan bahwa “penelitian deskriptif” adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Dengan demikian penelitian deskriptif yaitu penelitian yang memusatkan perhatian pada masalah-masalah sebagaimana adanya

saat penelitian dilaksanakan, dikatakan deskriptif karena bertujuan memperoleh pemaparan yang objektif.

Tujuan metode ini adalah untuk mendapatkan suatu hal yang dapat dibuktikan secara objektif untuk mendapatkan data sesuai dengan kegunaan dan tujuan tertentu. Adapun objek penelitian yang penulis teliti adalah pelaksanaan pendidikan politik oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Pangandaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Pendidikan dan Pelatihan Cabang (BADIKLATCAB) Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Pangandaran adalah salah satu badan partai yang mempunyai tugas untuk merumuskan sistem dan metode serta pembinaan komponen pendidikan dan pelatihan di lingkungan Partai. Badiklatcab bertanggung jawab atas Pelatihan dan pemahaman ideologi partai, strategi partai seta hal hal mengenai pengetahuan dan wawasan yang harus dimiliki oleh setiap kader PDI Perjuangan.

Adapun kegiatan yang dilakukan di tingkat DPC atau kabupaten ini adalah dengan Pendidikan Kader Pratama (PKP) salah satunya. Pendidikan Kader Pratama ini merupakan kegiatan pelatihan yang wajib diikuti oleh kader partai khususnya para pengurus partai mulai dari pengurus DPC, PAC, Ranting dan Anak Ranting.

Materi yang disampaikan dalam proses pendidikan politik kepada kader

dan pengurus partai lebih berorientasi kepada pemantapan dan pengembangan program partai, peningkatan loyalitas dan dedikasi kader, peningkatan kualitas, kemampuan kader untuk dapat berfikir futuristik. Sedangkan materi yang disampaikan dalam proses pendidikan politik kepada masyarakat meliputi posisi, hak, kewajiban dan tanggungjawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan konstitusi negara.

Dengan demikian maka peneliti menjelaskan bahwa pelaksanaan indikator ini belum optimal dan belum dilaksanakan dengan idealnya. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan indikator ini peneliti melakukan wawancara dengan informan mengenai hambatan tersebut. Hambatan yang ditemui diantaranya mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih kurang dalam pemahaman mengenai materi-materi yang disampaikan, dan biaya yang relatif besar untuk dikeluarkan dalam rangka mengadakan kegiatan kaderisasi pratama.

Selain itu peneliti juga menanyakan tentang upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, dengan hasil sebagai berikut: hambatan mengenai SDM dilakukan dengan upaya pemantauan dan pendampingan oleh para anggota Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Pangandaran, dan melakukan efisiensi biaya dengan cara memadatkan kegiatan kaderisasi pratama yang idealnya dilaksanakan satu minggu menjadi tiga hari saja.

Dengan demikian maka peneliti menjelaskan bahwa pelaksanaan indikator ini belum terlaksana secara optimal dan belum dilaksanakan dengan idealnya. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan indikator ini peneliti melakukan wawancara dengan informan mengenai hambatan tersebut. Hambatan yang ditemui diantaranya mengenai sikap arogansi dan premanisme, kurangnya sopan santun yang ditemui pada beberapa kader saja.

Selain itu peneliti juga menanyakan tentang upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, dengan hasil sebagai berikut: dengan membekali materi-materi mengenai cara berkomunikasi yang baik (*public speaking*) sehingga diharapkan para kader mampu berkomunikasi dengan baik terhadap konstituen baik secara berkelompok maupun personal (*door to door*).

Metode yang digunakan untuk menyampaikan materi kepada kader dan pengurus partai adalah penyampaian yang intensif secara langsung untuk membentuk *mindset* mereka agar memiliki loyalitas dan integritas kepada partainya. Metode yang digunakan untuk menyampaikan materi kepada masyarakat dapat berupa penyampaian secara langsung maupun tidak langsung. Namun pada praktiknya, penyampaian materi lebih sering dilakukan secara tidak langsung misalnya dengan menggunakan media massa dan media sosial sebagai perantara.

Selain penyampaian materi pendidikan politik, PDI Perjuangan juga menerapkan beberapa metode selama proses pendidikan kader mudanya (Pendidikan Kader Pratama). Berdasarkan Firmanzah dalam Labolo (2015) Metode yang digunakan untuk menyampaikan materi kepada kader dan pengurus partai adalah penyampaian yang intensif secara langsung untuk membentuk “mindset” kader, agar memiliki loyalitas dan integritas kepada partainya.

Metode yang digunakan PDI Perjuangan untuk menyampaikan materi kepada kader dapat berupa penyampaian secara langsung maupun tidak langsung. Penyampaian materi kepada kader lebih sering dilakukan secara langsung ketika melaksanakan proses pendidikan kader.

Dengan demikian maka peneliti menjelaskan bahwa pelaksanaan indikator ini belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari aplikasi Media Pintar Perjuangan (MPP) yang merupakan aplikasi yang diwajibkan oleh partai untuk dimiliki dan diakses oleh seluruh kader PDI Perjuangan khususnya di wilayah DPC Kabupaten Pangandaran provinsi Jawa Barat baru diakses oleh sedikit kader saja.

Tujuan partai politik memberikan pendidikan politik bagi kader dan pengurus partai adalah untuk meningkatkan solidaritas politik dalam menjaga dan memelihara integritas bangsa, memberikan pengetahuan tentang tugas, fungsi, hak dan kewajiban partai politik serta untuk

meningkatkan kapasitas kader dan pengurus partai. Diharapkan dengan diselenggarakannya pendidikan politik tersebut akan mendorong partisipasi politik dari kader dan pengurus serta masyarakat.

Dengan demikian maka peneliti menjelaskan bahwa pelaksanaan indikator ini belum berjalan secara optimal terlihat dari peran pemerintah dalam memberikan sosialisasi kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara masih kurang apalagi ditambah dengan dampak covid 19. Adapun upaya yang dilakukan dengan memberikan amanat kepada seluruh partai politik sebagai mitra, melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan politik di masing-masing partai untuk memberikan materi pendidikan mengenai kesadaran hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan pendidikan politik oleh DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Pangandaran dalam upaya mendukung pemerintah daerah untuk meningkatkan kesadaran berpolitik masyarakat di Kabupaten Pangandaran belum berjalan secara optimal, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan hasil penelitian ditemukan permasalahan yaitu Sumber Daya Manusia yang kurang kompeten, adanya

keterbatasan anggaran untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan, masih kurangnya pemahaman kader tentang nilai-nilai etis dan estetis, kurangnya pemahaman tentang kesadaran hak dan kewajiban sebagai warga negara yang dilakukan oleh pemerintah, sebagai mitra DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pangandaran karena terkendala dampak Covid 19.

Berdasarkan teori menurut Labolo (2017:21) yang menyatakan bahwa partai politik memiliki kewajiban untuk melakukan pendidikan politik kepada pengurus dan kader serta masyarakat yang meliputi dimensi Materi Pendidikan, dimensi Metode Pendidikan dan dimensi Tujuan Pendidikan. Diantara ketiga dimensi tersebut terdapat dua dimensi yang belum berjalan secara optimal yaitu dimensi materi pendidikan dan dimensi metode pendidikan.

Selanjutnya adapun hambatan-hambatan yang ditemui adalah kurangnya Sumber Daya Manusia yang kompeten, adanya keterbatasan anggaran untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan, masih kurangnya pemahaman kader tentang nilai-nilai etis dan estetis, kurangnya sosialisasi tentang kesadaran hak dan kewajiban sebagai warga negara yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sebagai mitra DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pangandaran karena terkendala dampak Covid 19.

Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada adalah mengenai

SDM yang kurang kompeten dilakukan dengan upaya pemantauan dan pendampingan oleh para anggota Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Pangandaran, tentang kurangnya anggaran untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan dilakukan dengan pemadatan waktu kegiatan sebagai bentuk efisiensi anggaran dengan cara memadatkan kegiatan kaderisasi pratama yang idealnya dilaksanakan satu minggu menjadi tiga hari saja, mengenai hambatan kurang etisnya sikap kader dilakukan dengan upaya memberikan pendidikan dan pelatihan mengenai etika terutama dalam hal berkomunikasi politik serta diarahkan untuk lebih menyesuaikan diri terhadap lingkungannya dan memahami situasi dan kondisi. Untuk hambatan kurangnya sosialisasi tentang kesadaran hak dan kewajiban sebagai warga negara yang dilakukan oleh pemerintah karena terkendala dampak Covid 19, upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan amanat kepada seluruh partai melalui pelaksanaan pendidik dan pelatihan politik di masing-masing partai untuk memberikan materi pendidikan mengenai kesadaran hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

Kartono, Kartini (2009). *Pendidikan Politik Sebagai Bagian Dari Pendidikan Orang Dewasa*. Bandung : CV Mandar Maju

- Labolo, Muhadam (2015). *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. Teori, Konsep dan Isu Strategis*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- ANDRIYANSYAH, R. (2012). *PELAKSANAAN FUNGSI PARTAI POLITIK SEBAGAI SARANA PENDIDIKAN POLITIK (Studi Di Kantor Partai Golkar Dan Partai PDI Kabupaten Nunukan)* (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang).
- Fitriyah, D. N. (2018). *Pendidikan Politik Kader Partai Di Indonesia (Studi Kasus Pendidikan Kader Pratama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Surabaya)* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Kasih, D., & Sudarji, S. (2017). Hubungan *self efficacy* terhadap kecemasan berbicara di depan umum pada mahasiswa program studi psikologi Universitas Bunda Mulia. *Psibernetika*, 5(2).
- Rimenda, K., Westra, I. K., & Priyanto, I. M. D. (2013). Pelaksanaan Larangan Klausula Eksonerasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pada Usaha Layanan Jasa Di Kota Denpasar. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 1, 1-12.
- Rahman, A., & Suharno, S. (2020). *Pelaksanaan Pendidikan Politik Melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk Meningkatkan Kesadaran Politik Siswa. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2), 282-290.
- Rosyid, H. (2019). *Pelaksanaan pendidikan politik oleh DPD Partai Gerindra Jawa Timur dalam rangka menghadapi Pemilu Serentak 2019 (Studi pada DPC Partai Gerindra Kabupaten dan Kota Mojokerto)*. *Humanis: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, 11(1), 29-38.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
- UU No. 1 Tahun 2018 tentang tata cara perhitungan, penganggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dan tertib administrasi pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggung jawaban keuangan partai politik.